

# Pelatihan Literasi Digital Bagi Kalangan Pemilih Pemula Di Kota Serang

Nia Kania Kurniawati

Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

\*Corresponding e-mail: kurniawati@untirta.ac.id

## Abstrak

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) (2023), dari total 204,8 juta pemilih pada tahun 2024, sebanyak 25 juta merupakan pemilih pemula (usia 17-25 tahun). Hal ini menunjukkan bahwa generasi Z akan menjadi penentu dalam aspek politik dalam 5 tahun mendatang. Namun, berdasarkan beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (2021), terlihat bahwa pandangan anak muda terhadap politik cenderung pesimis. Hal ini karena pemilih pemula memiliki antusiasme tinggi, keingintahuannya juga tinggi namun cenderung pragmatis. Berdasarkan hal itu, Generasi Z yang sebagian adalah pemilih pemula akan dilatih literasi digital untuk menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024. Kegiatan ini bertujuan melatih pemilih pemula dalam mengenali dan menghindari penyebaran informasi palsu (disinformasi) atau provokasi (kacau IDE). Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi kelompok kecil. Ada 10 kelompok dengan masing-masing 10 anggota. Materi yang akan dibahas meliputi pengertian pemilu, demokrasi, cara mengenali hoaks, serta pentingnya menghindari sanksi. Terakhir, akan dilakukan simulasi menggunakan Chatbot Kalimasada melalui WhatsApp untuk memeriksa kebenaran informasi. Peserta dapat mengenali tanggung jawabnya dalam Pilkada, menjelaskan pendapatnya tentang pemimpin ideal, serta memahami serta mampu mengidentifikasi informasi melalui alat pengecek fakta dan hoaks secara mandiri serta menghindari ujaran kebencian.

**Kata kunci** — Generasi Z, Pemilih Pemula, Tular Nalar, Literasi Digital, Kacau IDE

## Abstract

Based on data from the General Election Commission (KPU) (2023), of the total 204.8 million voters in 2024, 25 million are first-time voters (aged 17-25 years). This shows that generation Z will be the determining factor in political aspects in the next 5 years. However, based on several studies, such as those conducted by Indonesian Political Indicators (2021), it appears that young people's views on politics tend to be pessimistic. This is because novice voters have high enthusiasm, curiosity is also high but tend to be pragmatic. Based on this, Generation Z, some of whom are first-time voters, will be trained in digital literacy to face the Regional Head Election (Pilkada) on November 27 2024. This activity aims to train first-time voters in recognizing and avoiding the spread of false information (disinformation) or provocation (chaotic IDE). The method used in this activity is small group discussion. There are 10 groups with 10 members each. The material that will be discussed includes the meaning of elections, democracy, how to recognize hoaxes, and the importance of avoiding sanctions. Finally, a simulation will be carried out using the Kalimasada Chatbot via WhatsApp to check the correctness of the information. Participants can recognize their responsibilities in the regional elections, explain their opinions about ideal leaders, and understand and be able to identify information through independent fact and hoax checking tools and avoid hate speech.

**Keywords** — Generation Z, Beginner Voters, Reasonable, Digital Literacy, Confused IDE



## 1. PENDAHULUAN

Pemilih pemula merupakan suatu kelompok pemilih yang baru pertama kali berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (Bakti dkk, 2012). Sebagai generasi kelompok pemilih yang tumbuh dan berkembang di era digital maka para pemilih pemula pun turut serta beradaptasi dengan perkembangan kontemporer yang ada terkait dengan proses pencarian informasi politik.

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik merupakan upaya untuk mentransfer nilai-nilai ideologi dan norma-norma politik dari generasi ke generasi. Melalui pendidikan politik diharapkan terwujudnya warga negara yang menyadari hak dan kewajibannya, serta rela berpartisipasi dalam politik (Siswanto, 2020). Sari (2019) dalam penelitiannya menuliskan bahwa adanya pendidikan politik dan partisipasi politik pemilih pemula mempunyai pengaruh yang signifikan. Elemen penting lainnya dari literasi digital adalah kemampuan mengevaluasi konten informasi. Kemampuan pemilih yang belum berpengalaman dalam menilai kandungan informasi merupakan modal berharga dalam menyikapi beragamnya informasi yang disajikan di dunia maya.

Salah satu penerapan evaluasi pemilih terhadap konten informasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi berita palsu dan konten negatif lainnya dalam konten informasi. Oleh karena itu, jika dilihat dari situasi saat ini, generasi Z mempunyai peluang untuk mengakses informasi secara lebih komprehensif dibandingkan generasi pemilih sebelumnya. Namun pertanyaannya adalah bagaimana para pemilih baru ini akan berpikir kritis dan bertindak ketika mereka mengevaluasi informasi yang berkembang. Mereka menghadapi isu-isu negatif seperti *cyberbullying*, *black campaign*, misinformasi, ujaran kebencian, dan isu SARA.

Oleh karena itu, tidak ada keraguan bahwa Generasi Z perlu dididik tentang pemilu dan demokrasi agar tidak terjerumus ke dalam iliterasi digital. Melalui Pelatihan Sekolah Kebangsaan adalah kelas pelatihan Tular Nalar yang dikhususkan untuk anak-anak muda, khususnya calon pemilih pemula. Dalam Kelas Sekolah Kebangsaan ini, peserta diajak untuk memahami cara berpikir kritis sebagai pemilih pemula agar dapat berpartisipasi dalam Pilkada tanggal 27 November 2024; mampu

memeriksa fakta serta menavigasi berbagai tantangan digital, dan berkomitmen untuk menjadi pemilih cerdas.

## 2. METODE

Tahap kegiatan pembinaan ini terdiri atas 3 tahap yang diawali dengan tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penutup. Pada tahap persiapan, para 10 fasilitator yang akan mendampingi peserta melakukan pendalaman materi. Selain itu, seluruh tim yang terlibat dalam pelaksanaan pembinaan ini melakukan beberapa pertemuan yaitu konsolidasi dengan pihak terkait yaitu, Bawaslu Provinsi Banten, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), serta SMKN 1 yang berpartisipasi, melakukan persiapan teknis, serta melakukan simulasi untuk meminimalisir kendala selama kegiatan pembinaan berlangsung.

Tahap selanjutnya ialah pelaksanaan kegiatan yang rencananya berlangsung selama kurang lebih 150 menit. Adapun rangkaian acara kegiatan pembinaan tersebut ialah pembukaan, penyampaian laporan kegiatan oleh ketua tim pelaksana (PIC), penyampaian materi talkshow oleh ketua Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten, dosen prodi Ilmu Komunikasi serta sambutan-sambutan dari Dekan Fisip Untirta dan Kepala Sekolah SMKN 1. Dilanjutkan dengan diskusi, dan penyampaian materi dengan bentuk akhir simulasi pengecekan informasi fakta atau hoaks oleh masing-masing peserta dengan menggunakan alat pengecek fakta dan hoaks berupa Chatbot Kalimasada melalui aplikasi WhatsApp dan aplikasi berbasis Android bernama Hoax Buster Tools.

Langkah terakhir adalah penutup, dimana setiap peserta diminta untuk meuliskan refleksi tentang materi dan hasil diskusi yang telah dilakukan. Selain menulis, beberapa peserta juga memilih untuk berbagi refleksi dan diskusi ditempelkan di *sticky notes* untuk dibaca peserta lain dan dijaikan arsip oleh pelaksana. Tahap terakhir dari acara ini adalah ketua tim mengucapkan terima kasih kepada semua peserta dan memberikan hadiah/*merchandise* serta menutup acara.

Untuk kegiatan pengabdian ini diperlukan para fasilitator yang memiliki kompetensi antara lain: 1) Memahami dasar-dasar advokasi anti hoaks, cara-cara melakukan identifikasi hoaks, serta memahami tipe-tipe disinformasi/misinformasi, 2) Mengetahui cara melakukan pengecekan fakta melalui berbagai

tools, 3) Memiliki komitmen untuk melakukan edukasi/literasi anti hoaks.

Para fasilitator ini akan membina para pemilih pemula yang berjumlah 100 orang yang merupakan siswa siswi SMKN 1 Kota Serang, dan diadakan di aula sekolah pada hari Selasa, 8 September 2024. Metode yang diterapkan dalam kegiatan pembinaan ini ialah diskusi kelompok kecil (*small group discussion*). Menurut Munandi dan Hamid, model pembelajaran diskusi kelompok kecil bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antarindividu, kemampuan analisis individu, kepekaan sosial, dan tanggung jawab dalam kelompok. Metode ini terbukti dapat meningkatkan hasil belajar individu secara signifikan dibandingkan metode konvensional (Hardiansyah et al., 2014).

Peserta kegiatan pembinaan ini dibagi menjadi 10 kelompok kecil, dan masing-masing kelompok beranggotakan 10 orang siswa. Dengan masing-masing didampingi oleh 1 (satu) orang fasilitator. Diskusi dilaksanakan secara serentak, diawali dengan pre test, lalu dimulai dengan menayangkan video edukasi, kemudian memberikan slide peraga pelatihan. Tidak lupa untuk diselingi games atau permainan supaya para siswa tidak bosan dan juga untuk memancing pikiran kritis mereka. Dan terakhir post test berikut refleksi diri melalui sticky notes dan diskusi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pembinaan pemilih pemula dalam rangka literasi digital yang dilaksanakan secara luring di aula SMKN 1 Kota Serang berjalan dengan lancar, di mana para peserta sangat aktif mendengar dan bertanya di setiap sesi diskusi kelompok kecil. Masing-masing fasilitator melaporkan bahwa semua peserta mampu menyampaikan opini atau pendapatnya saat sesi diskusi tersebut berlangsung. Tulisan refleksi yang ditempel masing-masing peserta pada sesi terakhir juga menjadi salah satu indikator nyata antusias peserta.

Materi pembinaan yang disampaikan oleh pemateri untuk memantik diskusi seluruh kelompok terdiri atas 3 segmen, yaitu: (1) Tahapan pemilu, (2) Demokrasi, (3) Mengindra hoaks pemilu, dan (4) Waspada sanksi. Materi Tahapan pemilu pada segmen 1, fokus membahas tentang keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik pada tahapan pilkada serentak di 37 Provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia. Silalahi (2016) mengemukakan bahwa partisipasi publik adalah satu dimensi inti dari demokrasi. Lebih lanjut, Silalahi mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi publik tidak diukur dari kemauan masyarakat untuk terlibat.

Namun dilihat dari seberapa tinggi keinginan birokrasi melibatkan masyarakat dalam memengaruhi aktivitas administrasi publik, termasuk dalam aktivitas politik.

Keinginan birokrasi untuk melibatkan masyarakat dapat dilihat dari upaya yang dilakukan secara intens menciptakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat, mengedukasi masyarakat, mengajak masyarakat berdiskusi, meminta masyarakat memberi masukan, memberi kesempatan dan wadah bagi masyarakat untuk berkonsultasi, dan berupaya menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat.

Pada segmen 1 kegiatan pembinaan ini, peserta diberi pemahaman terlebih dahulu tentang makna partisipasi publik yang secara khusus membahas tentang bentuk partisipasi publik Gen Z sebagai pemilih pemula dalam ranah politik utamanya dalam menyambut pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024 sebagai rangkaian pemungutan suar untuk Cagub dan Cawagub (37 Provinsi), Cabup dan Wabup (415 Kabupaten), dan Cawalkot dan Cawawallkot (93 Kota). Setelah itu peserta diminta untuk mengklasifikasikan bentuk partisipasi publik yang pernah dilakukan, lalu mendiskusikan bentuk partisipasi publik tersebut dalam kelompoknya masing-masing dan mengkritisi disertai penyampaian opini kepada kelompok yang lain. Fasilitator selalu mengingatkan kepada pemilih pemula untuk senantiasa mengawal demokrasi di wilayahnya masing-masing.

Selanjutnya, materi Demokrasi pada segmen 2 fasilitator memaparkan tentang keikutsertaan mencoblos di Pilkada Serentak menjadi sebagian upaya logis bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal demokrasi. Demokrasi juga harus dilandari berpikir kritis untuk menegosiasikan dua konsep berpikir yang kita miliki. Berpikir kritis penting dalam demokrasi yang mendorong Pilkada sehat di Indonesia.

Studi oleh Dettman dan Pepinsky (2023) menemukan bahwa orang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan latar belakang saat membuat keputusan. Pada bagian kedua kegiatan pembinaan ini, diskusi dimulai dengan meminta peserta menggunakan pemikiran kritis dan memantau perkembangan pilkada dengan tagar di media sosial secara tenang, menanggapi tagar tanpa menyebarkan hoaks, dan selalu memeriksa sumber informasi.

Materi terakhir ialah Mengindra Hoaks Pemilu pada segmen 3, di mana para fasilitator memaparkan tentang apa yang dimaksud dengan informasi fakta dan hoaks, sekaligus memperkenalkan beberapa alat yang dapat digunakan

---

dalam mendeteksi kebenaran suatu informasi secara mandiri. Para pemilih pemula harus mampu mengenali atau mengira potensi pengacauan informasi dari isu yang diterima atau beredar. Tujuan materi ini adalah untuk melatih diri secara psikologis agar menjadi kebal dengan memahami konsep inokulasi dan celah informasi. Rosi (2023) menyatakan dalam studinya bahwa sekarang adalah zaman di mana informasi melimpah atau komunikasi berlebihan (*communicative abundance*) melalui berbagai media sosial yang memungkinkan interaksi yang lebih intens dan menyebabkan netizen menjadi lebih bebas dalam menyebarkan dan berbagi informasi, termasuk hoaks.

Hoaks juga terjadi bukan karena kebetulan tapi dapat juga karena ketidasepahamannya dalam informasi yang tersedia tentang suatu topik atau isu tertentu dan juga kekosongan pengetahuan atau pemahaman besar antara apa yang sudah diketahui dan apa yang sebenarnya perlu diketahui. Setelah peserta dibekali materi 3, dilanjutkan dengan sesi diskusi yang diawali dengan meminta peserta mengambil gambar dalam amplop secara acak dan menebak apakah gambar yang dipilih adalah fakta atau hoaks.

Setelah itu, setiap kelompok berdiskusi tentang bagaimana cara menentukan hoaks atau fakta, lalu menjawab pertanyaan diskusi, dan mengutarakan pendapat kepada jawaban dari peserta lain. Pada segmen 3 fasilitator tiap kelompok juga memperkenalkan alat dan menunjukkan cara penggunaan alat cek fakta atau hoaks secara mandiri yang dilanjutkan dengan simulasi yang dilakukan oleh masing-masing peserta dengan menggunakan alat pengecek fakta dan hoaks berupa Chatbot Kalimasada melalui aplikasi WhatsApp dan aplikasi berbasis Android bernama Hoax Buster Tools.

Dan pada segmen keempat sebagai segmen terakhir, dibahas mengenai sanksi administrasi, sanksi sosial, dan sanksi digital. Sanksi denda terkait pemilu dapat ditemukan di Pasal 28 (2) No. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 mengenai ITE, serta Pasal 536. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menyatakan bahwa pelanggaran dapat dihukum dengan penjara selama 3 hingga 6 tahun serta denda mulai dari 36 juta hingga 1 milyar rupiah. Sanksi sosial bisa menjadi lebih buruk, seperti stigma atau isolasi sosial yang membuat pelaku merasa malu.

Kegiatan pembinaan ini terbagi menjadi 3 tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Pada tahap persiapan, ada tim yang menangani kegiatan. Tim ini terdiri dari seorang ketua tim yang juga bertindak sebagai pemateri, dan 10 fasilitator

sebagai pendamping kelompok, melakukan penyusunan dan pendalaman materi dengan tujuan meningkatkan rasa percaya diri dan mampu memengaruhi serta memotivasi peserta agar tujuan kegiatan pembinaan ini dapat dicapai dengan lebih baik. Selain itu, pada tahap persiapan ini tim pelaksana juga menggelar beberapa kali pertemuan sebelum pelaksanaan kegiatan, yaitu pertemuan dengan pihak sekolah yang telah mengonfirmasi keikutsertaan siswanya dalam kegiatan pembinaan ini, pertemuan persiapan teknis untuk mengecek kesiapan hal-hal teknis seperti alat yang akan digunakan, modul, *banner*, *backdrop*, konsumsi, sertifikat, absensi, dan hal yang dianggap perlu. Pertemuan untuk melakukan simulasi bagi pemateri dan fasilitator juga dilakukan untuk meminimalisir kendala yang diprediksi terjadi selama kegiatan pembinaan berlangsung.



**Gambar 1.** Pelaksanaan Kegiatan

Selanjutnya, tahap pelaksanaan kegiatan pembinaan diawali dengan acara pembukaan, penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan 4 segmen inti kegiatan yang berisi pemaparan materi dan diskusi kelompok kecil yang telah dirincikan pada paragraf sebelumnya, serta simulasi mengecek hoaks atau fakta oleh masing-masing peserta secara mandiri. Tahap berikutnya ialah penutup, di mana peserta diminta untuk menuliskan refleksi materi dan diskusi yang telah dilakukan pada 4 segmen tersebut dan menempelkannya pada media yang telah disediakan. Rangkaian akhir kegiatan ini ialah ketua tim pelaksana menyampaikan narasi penutup dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat sehingga kegiatan pembinaan ini dapat berlangsung dengan lancar tanpa kendala yang berarti.

---



**Gambar 2.** Pelaksanaan diskusi



**Gambar 3.** Tahap penutupan

Hasil dari pelatihan ini adalah peserta siswa tergerak untuk berpartisipasi dalam pilkada, berani menyatakan pendapat tentang karakter pemimpin daerah yang ideal, memahami hoaks dan fakta, serta mampu membiasakan melatih diri untuk memeriksa kebenaran informasi di dunia digital.

#### 4. SIMPULAN

Kegiatan pembinaan pemilih pemula sebagai agen literasi digital ini dilaksanakan selama kurang lebih 150 menit di aula SMKN 1 Kota Serang. Adapun peserta kegiatan ini ialah sebanyak 100 orang siswa SMKN 1 Kota Serang. Selama pelaksanaan kegiatan pelatihan ini, para peserta sangat antusias karena metode diskusi kelompok mini yang diterapkan. Metode ini pun disisipkan dengan games dan diskusi aktif. Berdasarkan pada hasil refleksi materi dan diskusi yang disampaikan oleh masing-masing peserta baik secara lisan maupun tertulis, diperoleh penilaian bahwa kegiatan pelatihan ini relevan dilakukan utamanya dalam menghadapi

Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 dan mampu memberikan dan meningkatkan pemahaman peserta tentang hoaks. Peserta memiliki pengetahuan baru tentang apa yang dimaksud dengan partisipasi publik beserta bentuknya serta memahami bagaimana seseorang memilih pemimpin daerah yang ideal. Kekurangannya mereka belum mengenal masing-masing calon pemimpin daerahnya. Dengan demikian saran ke depan agar pelatihan serupa yang bersifat lanjutan dapat dilaksanakan kembali dengan topik partisipasi aktif dalam politik dan pengenalan visi misi politik.

#### UCAPAN TERIMA KASIH (IF APPLICABLE)

Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) bersama Love Frankie dan Google.org. dalam melaksanakan sebuah program Tular Nalar sebagai portal pembelajaran literasi digital. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Banten yang berupaya melaksanakan pengawalan pemilu partisipatif, dan tentu saja mitra pelaksana yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Bersama-sama berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat agar mampu menyaring informasi di era digital yang penuh tantangan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Bakti, A. F. (2012). *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta, Churia Press.
- Dettman, S., Pepinsky, T.B, (2024). *Demographic Structure and Voting Behaviour during Democratization : evidence from Malaysia 'ws 2022 Election. Democratization*. Volume 31, Issue 1.
- Hardiansyah, H., Genjik, B., Syahrudin, H. (2014). *Penggunaan Model Pembelajaran Small Group Discussion untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Terpadu di Mts*. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020). *Antisipasi Hoaks*. Jakarta: Kominfo dan Siberkreasi.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Materi Pendukung Literasi Digital*. Jakarta: Tim GLN Kemendikbud.
- Khusnia, H. N., Junaidi, A., Muhlis., Yohanes, Y. T. S. (2024). *Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Desa*. Jurnal Karinov. 7 (2).

- 
- Rosi, B., (2023). *Mencegah Hoaks di Kampanye Pemilu 2024*. Jurnal Bawaslu DKI Jakarta, 8(3), 137-156.
- Sanmas, M., Nurjayanti. (2024). *Pelatihan Agen Literasi Digital bagi Pemilih Pemula di Kota Jayapura*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mandiri (JPMM). 2(2). 74-80
- Sari, N. S.. (2019). *Pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilu 2019 di SMA Kecamatan Bantul*. Jurnal Kebijakan Pendidikan. 8(4). 323-331.
- Silalahi, U. (2016). *Partisipasi Publik dalam Kegiatan Administratif Publik di Era Desentralisasi Demokratis : Kemauan Birokrasi Mempartisipasikan Warga dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Bandung : Unpar
- Siswanto, J. (2020). *Politik kebangsaan*. Malang, CV. IRDH.
- Tular Nalar. (2024). *Cue Card Fasilitator: Panduan Fasilitasi Tular Nalar*. Jakarta: Tim Tular Nalar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite) No. 19 Tahun 2016
-